



IMPLEMENTASI KEBIJAKAN INTEGRASI EKONOMI DAN DAMPAKNYA TERHADAP PENGEMBANGAN UMKM DI INDONESIA

Ayu Nursasi

Universitas Islam Negeri Prof.K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Nanda Hanifah

Universitas Islam Negeri Prof.K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Rifani Tri Handani

Universitas Islam Negeri Prof.K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Sarpini

Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Alamat: Jalan Ahmad Yani No. 40 A, Purwokerto

Korespondensi penulis: ayunursasi8823@gmail.com

Abstract. *Economic integration policies have had an influence on the development of Micro Small and Medium Enterprises (MSMEs) in Indonesia. Economic integration through initiatives such as the ASEAN Economic Community (AEC) and other related policies offers opportunities for MSMEs to access international markets, transfer technology, and adopt digitalization that can increase their competitiveness. However, MSMEs also face big challenges, such as tight competition with imported products, limited capital, limited technology, and inadequate facilities, especially in remote areas. The approach method applied in this research is literature study, by collecting data from various appropriate literature. The research results show that although economic integration policies provide great opportunities, many MSMEs still find it difficult to take full advantage of them due to various structural obstacles. Therefore, strategies are needed to increase access to financing, skills training, technology adoption, and infrastructure development that supports MSMEs. With the support of appropriate policies and synergy between various parties, MSMEs can be more competitive in the global market and contribute more significantly to the Indonesian economy.*

Keywords: *Economic Integration; Government policy; MSMEs*

Abstrak. Kebijakan integrasi ekonomi membawa pengaruh pada pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Integrasi ekonomi dengan inisiatif seperti Masyarakat Ekonomi ASEAN(MEA) dan kebijakan terkait lainnya menawarkan peluang bagi UMKM untuk mengakses pasar internasional, mentransfer teknologi, serta mengadopsi digitalisasi yang dapat meningkatkan daya saing mereka. Namun, UMKM juga menghadapi tantangan besar, seperti persaingan ketat dengan produk impor, keterbatasan modal, teknologi yang terbatas, serta fasilitas yang belum memadai, khususnya di wilayah terpencil. Metode pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini yaitu studi pustaka, dengan menghimpun data dari berbagai literatur yang tepat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kebijakan integrasi ekonomi memberikan peluang besar, banyak UMKM yang masih kesulitan untuk memanfaatkannya sepenuhnya karena berbagai hambatan struktural. Oleh karena itu, diperlukan strategi untuk meningkatkan akses pembiayaan, pelatihan keterampilan, adopsi teknologi, serta Pembangunan infrastruktur yang mendukung UMKM. Dengan dukungan kebijakan yang tepat dan sinergi antara berbagai pihak, UMKM dapat lebih berdayasaing di pasar global serta berkontribusi lebih signifikan pada perekonomian Indonesia.

Kata Kunci: Integrasi Ekonomi; Kebijakan Pemerintah; UMKM

PENDAHULUAN

Globalisasi ekonomi merupakan fenomena yang tidak dapat dihindari oleh suatu negara. Mau tidak mau, setiap pemerintah perlu mengadopsi globalisasi ekonomi ini sebagai sesuatu yang

tak terelakkan. Hal ini juga berlaku bagi Indonesia, yaitu suatu negara di Asia Tenggara yang menjadi bagian dari ASEAN (Association of Southeast Asian Nations). Sejak Desember 2015, ASEAN resmi mengimplementasikan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). MEA adalah sebuah program yang dirancang untuk meningkatkan kualitas ekonomi negara-negara ASEAN, terutama dalam sektor perdagangan (Putra Sitorus, 2018). Sementara itu, Integrasi ekonomi menjadi langkah strategis yang diambil banyak negara, termasuk Indonesia, untuk menghadapi tantangan globalisasi sekaligus memanfaatkan peluang yang ada. Melalui keterlibatan dalam inisiatif seperti Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), Perjanjian Perdagangan Bebas (FTA), dan Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), Indonesia berupaya meningkatkan daya saing ekonomi, menarik investasi, serta memperluas pasar bagi produk-produk lokal.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peranan yang sangat krusial dalam ekonomi Indonesia. Dengan menguasai 99,9% dari total lapangan kerja, UMKM berkontribusi sebesar 61,07% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, serta menyumbang 15,6% dalam ekspor Non-Migas (Fuat & Salomo, 2023). Selain mempunyai potensi yang besar, UMKM juga mengalami perkembangan yang cukup pesat dan saat ini masih dihadapkan pada banyaknya kendala, seperti keterbatasan akses modal, rendahnya penerapan teknologi, minimnya inovasi, dan kesulitan untuk bersaing di pasar internasional. Kemudian Kebijakan ekonomi Indonesia menunjukkan pendekatan poliarkis dalam upayanya untuk aktif berperan dalam integrasi ekonomi global. Sejak akhir tahun 1980-an, Indonesia telah menerapkan berbagai kebijakan yang bertujuan memperluas peran sektor swasta, baik di tingkat nasional maupun internasional (Winarno, 2014).

Kebijakan integrasi ekonomi yang diterapkan pemerintah membawa dampak yang beragam bagi UMKM. Di satu sisi, integrasi ini membuka peluang besar, seperti akses pasar yang lebih luas, kemudahan perdagangan antarnegara, dan potensi peningkatan investasi. Namun, di sisi lain, UMKM harus bersaing dengan produk asing yang memiliki kualitas dan harga kompetitif, sehingga menjadi tantangan yang cukup berat bagi pelaku usaha kecil. Untuk mendukung UMKM dalam menghadapi tantangan ini, pemerintah telah meluncurkan berbagai program strategis. Beberapa di antaranya adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk mendukung pembiayaan, digitalisasi UMKM melalui Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (BBI), serta penyederhanaan proses ekspor-impor melalui sistem Indonesia National Single Window (INSW). Selain itu, pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) juga memberikan peluang bagi UMKM untuk terhubung dengan perusahaan besar dan masuk ke rantai pasok global. Dari latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk mengeksplorasi bagaimana kebijakan integrasi ekonomi yang diterapkan di Indonesia berdampak pada pengembangan UMKM. Dengan memahami peluang dan tantangan yang ada, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang relevan untuk memperkuat posisi UMKM dalam menghadapi persaingan global.

KAJIAN TEORI

Dalam ekonomi modern, integrasi ekonomi baik regional maupun global telah menjadi tren. Sebagai negara berkembang dengan potensi ekonomi yang besar, Indonesia berpartisipasi dalam berbagai proyek integrasi ekonomi. Diharapkan pertumbuhan ekonomi dapat mendorong perkembangan UMKM dengan adanya kebijakan-kebijakan yang dibuat dalam proses integrasi ekonomi ini.

1. Integrasi Ekonomi

Integrasi ekonomi umumnya merujuk pada Penghilangan kendala-kendala ekonomi antara dua negara atau lebih. Lebih khusus lagi, integrasi ini berarti penghilangan diskriminasi serta penyatuan kebijakan politik dan ekonomi seperti peraturan, prosedur, dan norma. Instrumen yang digunakan pada Integrasi ekonomi mencakup aspek-aspek seperti bea masuk, pajak mata uang, peraturan hukum, lembaga, standarisasi, dan kebijakan ekonomi (Setiawan, 2015). Konsep ini memberikan keuntungan baik bagi negara anggota maupun negara non-anggota. Inti dari integrasi ekonomi adalah untuk mengurangi atau menghilangkan hambatan perdagangan antar negara anggota, sehingga dapat memperlancar arus barang dan jasa yang bebas melintasi batas negara masing-masing, yang pada gilirannya akan meningkatkan volume perdagangan (Firdaus et al., 2021). Integrasi ekonomi regional menjadi Integrasi ekonomi yang kawasannya semakin menjadi hal yang krusial dalam konteks pembangunan ekonomi regional. Di tengah globalisasi dan semakin terjalinnya hubungan antar negara, strategi integrasi ekonomi kawasan menjadi kunci untuk meningkatkan kerjasama, pertumbuhan, dan stabilitas ekonomi di tingkat regional.

Melalui integrasi ini, negara-negara atau wilayah dalam suatu kawasan dapat berkolaborasi untuk menciptakan iklim investasi yang lebih baik, memperluas akses pasar, meningkatkan efisiensi produksi, serta bersama-sama mengatasi berbagai tantangan. Integrasi ekonomi kawasan juga memiliki potensi besar untuk mengoptimalkan keunggulan komparatif antar wilayah, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan menciptakan lapangan kerja baru. Selain itu, integrasi ini juga dapat memperkuat hubungan sosial, budaya, dan politik antar negara atau wilayah, yang pada gilirannya dapat mendorong kerja sama yang lebih erat dan mencari solusi bersama untuk berbagai permasalahan yang dihadapi (Naibaho et al., 2023). Menurut Balassa, terdapat lima tahap utama dalam integrasi ekonomi, yakni Area Perdagangan Bebas (Free Trade Area), Serikat Pabean (Customs Union), Pasar Bersama (Common Market), Uni Ekonomi (Economic Union), dan Integrasi Penuh (Full Integration). Di ASEAN, Indonesia saat ini berada pada tahap pasar bersama, dengan fokus pada liberalisasi sektor perdagangan dan investasi (Jasin, 2017).

2. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

UMKM adalah jenis usaha produktif yang dimiliki oleh individu atau badan usaha dengan kriteria tertentu, seperti jumlah karyawan, skala usaha, dan omzet yang relatif kecil, serta umumnya didirikan dengan modal terbatas. UMKM mencakup usaha mikro, kecil, dan menengah yang dijalankan oleh individu, kelompok, rumah tangga, atau badan usaha kecil lainnya (Hapsari et al., 2024). Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM dapat didefinisikan dengan kriteria sebagai berikut:

- Usaha mikro adalah usaha produktif yang dimiliki oleh individu atau badan usaha yang memenuhi ketentuan yang diatur dalam undang-undang tersebut.
- Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dijalankan oleh individu atau badan usaha, dan bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan besar atau menengah.
- Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan tidak terhubung langsung atau tidak langsung dengan perusahaan besar atau kecil, dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sesuai ketentuan undang-undang.

Dalam hal perkembangannya, UMKM dapat dikelompokkan menjadi empat kategori, yaitu:

- Livelihood Activities, yaitu UMKM yang berfungsi sebagai sumber penghidupan, biasanya dikenal sebagai sektor informal, seperti pedagang kaki lima.

2. Micro Enterprise, yaitu UMKM yang bergerak di bidang kerajinan tetapi belum memiliki semangat kewirausahaan.
3. Small Dynamic Enterprise, yaitu UMKM dengan jiwa kewirausahaan yang sudah mampu menerima pekerjaan subkontrak dan melakukan ekspor.
4. Fast Moving Enterprise, yaitu UMKM dengan jiwa kewirausahaan yang berkembang menjadi usaha yang lebih besar. (Andarini et al., 2023).

Menurut teori pengembangan UMKM dari Schmitz, peningkatan daya saing UMKM di pasar global dapat dicapai melalui spesialisasi dan peningkatan kualitas. UMKM memiliki peran penting sebagai penggerak perekonomian lokal di berbagai daerah di Indonesia. Peningkatan PDB sektor UMKM menunjukkan kinerja yang semakin baik, yang harapannya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dari kalangan menengah ke bawah. Dengan mengacu pada prinsip-prinsip dasar UMKM, diharapkan para pemangku kepentingan UMKM dapat membangun rasa kebersamaan, solidaritas, dan kemandirian yang kokoh, serta menciptakan persaingan yang sehat di antara pelaku usaha UMKM.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka, yaitu pendekatan yang mengandalkan analisis terhadap berbagai sumber literatur, seperti artikel, buku, dan jurnal akademik yang relevan dengan topik yang diteliti. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh wawasan yang lebih dalam mengenai kerangka konseptual, teori-teori yang terkait, temuan-temuan dari penelitian sebelumnya, serta perkembangan terbaru dalam bidang yang sedang diteliti (Suhairi et al., 2024). Untuk pengumpulan data, penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber yang tersedia pada dokumen dan publikasi yang sudah ada, seperti artikel, laporan penelitian, dan buku yang berhubungan dengan kebijakan integrasi ekonomi serta dampaknya terhadap pengembangan UMKM di Indonesia. Metode analisis data yang diterapkan adalah penyajian data, yang berupa kumpulan informasi yang disusun sedemikian rupa untuk menarik kesimpulan dan mengambil langkah-langkah selanjutnya. Beberapa bentuk penyajian data yang digunakan antara lain teks naratif, laporan lapangan, tabel, jaringan, serta diagram (Rijali, 2019).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Kebijakan Integrasi Ekonomi Terhadap Pengembangan UMKM

Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia sangat dipengaruhi oleh kebijakan integrasi ekonomi. Berbagai kebijakan telah diterapkan untuk meningkatkan daya saing UMKM serta kapasitas mereka dalam menghadapi kompetisi global. Pemberdayaan UMKM juga memiliki peran penting dalam perekonomian global, mengingat UMKM menjadi pilar utama ekonomi dunia. Di Indonesia, UMKM merupakan salah satu landasan ekonomi nasional, dengan data dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang menunjukkan bahwa UMKM berkontribusi 99% dari total unit usaha, memberikan sumbangan 60,5% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), dan menyerap tenaga kerja sebesar 96,9%. UMKM telah terbukti menjadi elemen vital bagi perekonomian Indonesia, menunjukkan ketahanan menghadapi krisis dan berperan sebagai penggerak pemulihan ekonomi saat krisis terjadi.

Namun, banyak UMKM di berbagai daerah di Indonesia menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan akses keuangan, strategi pemasaran dan promosi, infrastruktur dan teknologi, regulasi serta birokrasi, serta kekurangan keterampilan dan pengetahuan. Oleh

karena itu, dibutuhkan kerja sama dan peran aktif dari berbagai pemangku kepentingan untuk memperkuat sektor UMKM sebagai salah satu pendorong utama pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Berdasarkan dengan pasal 97 Undang-Undang Cipta Kerja, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah diwajibkan untuk mengalokasikan minimal 40% produk atau jasa yang dihasilkan oleh Usaha Mikro dan Kecil, serta Koperasi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku. Salah satu kebijakan pemerintah yang telah di implementasikan untuk memberdayakan UMKM di Indonesia adalah:

- a. Pembangunan infrastruktur, di mana infrastruktur yang memadai akan membantu UMKM dalam meningkatkan efisiensi operasional serta memperluas pasar yang dapat dijangkau. Meskipun UMKM mungkin tidak memberikan dampak langsung yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi makro, mereka tetap memiliki peran penting dalam perekonomian lokal. UMKM sering kali menjadi tulang punggung ekonomi di daerah-daerah pedesaan dan berperan dalam pemberdayaan masyarakat lokal. Infrastruktur merupakan faktor kunci yang mempengaruhi kemampuan UMKM untuk berkembang dan memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Infrastruktur yang baik, terutama infrastruktur jalan, sangat penting untuk memfasilitasi distribusi produk, akses ke pasar, dan mobilitas barang serta jasa. Penelitian oleh Aulia dkk menunjukkan bahwa infrastruktur yang memadai dapat menurunkan biaya logistik, meningkatkan efisiensi distribusi, dan memperluas akses pasar bagi UMKM (Fardani et al., 2024). Pembangunan infrastruktur konektivitas digital, seperti Satelit Palapa Ring dan Stasiun Pemancar Basis (Base Transceiver Station), akan memudahkan pelaku usaha yang berada di daerah terpencil untuk terhubung secara digital.
- b. Program Pembiayaan mencatat bahwa sekitar 18 juta UMKM belum memiliki akses ke pembiayaan formal, sementara sekitar 46 juta UMKM masih memerlukan tambahan pembiayaan untuk modal kerja dan investasi. Saat ini, pengembangan UMKM menghadapi berbagai hambatan dan tantangan dalam menghadapi persaingan bisnis yang semakin ketat. Meskipun terdapat berbagai keterbatasan, UMKM diharapkan dapat tetap menjadi andalan perekonomian Indonesia. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah diharapkan dapat berkontribusi sebagai sumber penting dalam meningkatkan pendapatan dan memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat (Mokalu et al., 2018). Pada tahun 2022 Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang diperluas hingga Rp373,17 triliun memberikan peluang pembiayaan kepada UMKM, khususnya yang berorientasi ekspor. UMKM juga mendapatkan manfaat dari kemitraan dengan lembaga keuangan dan investor dengan begitu Pemerintah memberikan dukungan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan pembiayaan Ultra Mikro.
- c. Digitalisasi UMKM menawarkan berbagai manfaat, seperti efisiensi operasional, peningkatan produktivitas, perluasan jangkauan pasar, dan penguatan daya saing. Kehadiran teknologi digital memfasilitasi akses yang lebih mudah bagi perusahaan yang berkembang serta pelaku UMKM untuk meningkatkan kinerja bisnis dan membangun ketahanan usaha di era normal baru. Teknologi digital membuka peluang berharga bagi UMKM untuk meningkatkan keunggulan kompetitif di industri yang sangat kompetitif saat ini. Hal ini sangat penting bagi UMKM, mengingat sektor ini dianggap sebagai bagian esensial dari ekonomi yang memengaruhi stabilitas dan daya saing perekonomian suatu negara (Agustin et al., 2023). Pemerintah mendorong transformasi digital melalui program seperti Gerakan Bangga Buatan Indonesia. Hingga pada bulan

Januari tahun 2022, sebanyak 17,2 juta UMKM telah terdigitalisasi. Pada tahun 2024, ditargetkan 40 juta UMKM terdigitalisasi. Kebijakan ini telah meningkatkan keterlibatan UMKM di platform e-commerce, sehingga memperluas jangkauan pasar mereka.

- d. Kolaborasi dan Koordinasi, peningkatan kolaborasi dan Koordinasi yang baik antara sektor publik, akademik, dan swasta, serta pengembangan skema pembiayaan syariah untuk UMKM, sangat krusial untuk meningkatkan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

2. Dampak Kebijakan Integrasi Ekonomi Terhadap Pengembangan UMKM

Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia sangat dipengaruhi oleh kebijakan integrasi ekonomi yang diterapkan oleh perjanjian perdagangan bebas dan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang terdapat beberapa dampak positif dan negatif.

- a. Peluang akses pasar yang lebih luas

Integrasi ekonomi membuka peluang bagi UMKM untuk menjual produk mereka di pasar internasional, terutama di kawasan ASEAN. Penghapusan hambatan tarif memungkinkan produk UMKM bersaing lebih kompetitif di pasar luar negeri. Dengan adanya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang telah terbentuk, Indonesia memiliki kesempatan untuk mengembangkan akses pasar ke seluruh kawasan ASEAN yang saat ini telah berubah menjadi pasar tunggal. Kehadiran pasar tunggal ini memberi kesempatan kepada produk-produk Indonesia untuk bersaing dengan lebih lancar di tingkat regional. Bidang-bidang seperti makanan olahan, otomotif, serta produk kimia menonjol dengan pertumbuhan yang signifikan setelah MEA. Contohnya, produk makanan olahan khas Indonesia saat ini memiliki kesempatan yang lebih besar untuk merambah pasar di negaranegara tetangga karena penurunan tarif dan regulasi yang lebih konsisten (Hermana et al., 2025).

- b. Digitalisasi dan inovasi

Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan teknologi digital telah mengubah lanskap bisnis secara signifikan, termasuk di sektor UMKM. Digitalisasi tidak hanya menyediakan kesempatan baru bagi UMKM untuk memperluas pasar mereka, tetapi juga meningkatkan efisiensi dalam operasional dan juga membawa tantangan baru yang memerlukan adaptasi cepat. Menyadari hal ini, pemerintah Indonesia sudah mengimplementasikan berbagai kebijakan ekonomi agar dapat mendukung transformasi digital UMKM. Kebijakan tersebut meliputi insentif finansial, program pelatihan literasi digital, serta pengembangan infrastruktur teknologi informasi. Integrasi mendorong UMKM untuk mengadopsi teknologi digital, seperti e-commerce dan pembayaran digital. Hal ini memperluas jangkauan pemasaran dan efisiensi operasional UMKM (Yasmanlizar, 2024).

- c. Transfer pengetahuan dan teknologi

Transfer pengetahuan merupakan suatu proses di mana pengetahuan dialihkan atau dipindahkan dari satu individu atau departemen kepada orang lain. Proses ini melibatkan pemindahan pengetahuan dari satu pihak ke pihak lainnya melalui berbagai cara, seperti komunikasi, penerjemahan, konversi, penyaringan, dan penggambaran. Pemindahan pengetahuan dapat berlangsung pada berbagai tingkat, mulai dari antar individu, individu dengan kelompok, antar kelompok, hingga antara kelompok dengan organisasi. Tujuan dari pemindahan pengetahuan adalah untuk mendistribusikan

pengetahuan kepada berbagai pihak di dalam organisasi. Sedangkan transfer teknologi adalah proses untuk menciptakan aplikasi baru untuk teknologi yang sudah ada. Transfer teknologi juga didefinisikan sebagai proses untuk mengubah penelitian menjadi pembangunan ekonomi. Istilah transfer teknologi juga digunakan untuk berarti pemberian lisensi kekayaan intelektual kepada produsen untuk produksi, atau mengubah ide menjadi praktik dalam bentuk prototipe, atau bahkan proses pencatatan konsep pengetahuan teknologi dalam makalah profesional atau aplikasi paten. Jadi dengan adanya transfer pengetahuan dan teknologi pengembangan UMKM dapat bekerja sama dengan perusahaan asing melalui integrasi ekonomi dengan begitu dapat memungkinkan UMKM untuk belajar teknologi baru dan praktik bisnis yang lebih maju, sehingga meningkatkan daya saing mereka (Asmoro, 2017).

d. Dukungan kebijakan pemerintah

Pemerintah Indonesia juga berperan penting dalam mendukung peningkatan ekspor dengan menerapkan kebijakan yang strategis. Terdapat sejumlah program yang telah disusun guna meningkatkan daya saing produk unggulan Indonesia, antara lain melalui promosi perdagangan internasional, peningkatan standar kualitas, dan inovasi produk. Selain itu, dilakukan pemetaan produk unggulan guna memastikan fokus pada komoditas dengan potensi besar di pasar ASEAN. Langkah-langkah ini memberikan dukungan nyata kepada para pelaku usaha, memperluas pasar ekspor, dan juga meningkatkan reputasi positif produk Indonesia di dunia internasional. MEA memberikan kesempatan besar bagi Indonesia untuk meningkatkan daya saing dan diversifikasi ekspor melalui dukungan kebijakan yang tepat serta kerjasama antara pemerintah dan pelaku usaha. Saat ini merupakan waktu yang penting bagi Indonesia untuk mengoptimalkan keuntungan dari integrasi ekonomi regional. Tidak hanya meningkatnya aktivitas ekspor di Indonesia, namun juga terjadi perubahan penting dalam pola impor yang diperlakukan di negara ini. Kebijakan integrasi sering diiringi dengan inisiatif pemerintah, seperti pelatihan, program pendanaan, dan subsidi untuk membantu UMKM meningkatkan kapasitas mereka dalam menghadapi persaingan regional (Hermana et al., 2025).

e. Persaingan dengan produk impor

Pembatasan impor bisa merugikan UMKM karena membatasi peluang untuk berinovasi, seperti meningkatkan kualitas produk, efisiensi biaya, dan mengadopsi teknologi baru. Inovasi sering kali muncul sebagai respon terhadap persaingan dan keinginan untuk mempelajari fitur-fitur produk asing yang telah terbukti sukses. Melalui persaingan dengan produk impor, pengusaha lokal dapat mengukur diri dengan standar pasar global, mengidentifikasi kelemahan dalam produk mereka, serta menerapkan inovasi yang dipelajari dari fitur-fitur unggul produk impor. Dampak negatif dari pembatasan impor ini akan sangat terasa bagi UMKM yang berperan sebagai reseller, karena pasokan barang impor mereka akan dibatasi. Sama halnya dengan distributor, reseller membeli barang yang tidak digunakan secara langsung, melainkan untuk dijual kembali.

Namun, berbeda dengan distributor yang memperoleh pasokan langsung dari produsen, reseller cenderung memperoleh pasokan melalui perantara lainnya. Sama halnya dengan kebijakan pembatasan impor lainnya, kebijakan ini akan membatasi akses konsumen terhadap produk asing. Ini berarti bahwa konsumen akan kehilangan kesempatan untuk menikmati beragam produk dengan harga yang lebih kompetitif,

yang sering kali ditawarkan oleh produk impor. Pengetatan regulasi untuk mengendalikan impor juga dapat menimbulkan dampak yang tidak diinginkan bagi pemerintah, seperti meningkatnya impor ilegal. Fenomena ini sering terjadi ketika produk yang dicari tidak tersedia di dalam negeri atau harganya jauh lebih tinggi dibandingkan produk impor. Meningkatnya kasus impor ilegal menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah, karena harus menambah alokasi sumber daya untuk memantau dan menindak aktivitas ilegal ini. Jadi UMKM menghadapi persaingan ketat dari produk asing yang sering kali lebih murah dan memiliki kualitas yang lebih konsisten. Hal ini mengancam keberlangsungan UMKM yang belum memiliki daya saing memadai (Hasran, Rasya Athalla Aaron, 2024).

f. Keterbatasan kapasitas dan sumber daya

Pengelolaan informasi berkualitas sangat penting dalam membangun keunggulan kompetitif. Meski UKM harus beradaptasi dengan perubahan yang begitu cepat di lingkungan bisnis, namun mereka menghadapi tantangan signifikan dalam pengelolaan informasi disebabkan keterbatasan sumber daya manusia. Hambatan terkait sumber daya manusia ini mencakup kurangnya motivasi, jumlah tenaga kerja yang terampil dan berbakat yang minimal, serta keterbatasan dalam kemampuan melakukan transfer pengetahuan dan manajemen teknologi. Akhirnya, UKM kesulitan meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kualitas produksi mereka. Oleh karena itu, banyak UMKM masih menghadapi kendala dalam hal modal, teknologi, dan sumber daya manusia, yang membuat mereka sulit beradaptasi dengan tuntutan pasar internasional (Cahyadi, 2015).

g. Kurangnya infrastruktur

Salah satu penghambat utama pertumbuhan negara-negara di Asia adalah kurangnya dukungan infrastruktur. Konektivitas transportasi dan sistem logistik yang lemah menghalangi perkembangan bisnis di Indonesia, dan hal ini menyulitkan pemerintah dalam upaya mengurangi kemiskinan dan kesenjangan. Pengembangan infrastruktur sangat diperlukan untuk mendukung pertumbuhan, terutama di daerah. Selain investasi dalam infrastruktur fisik, peningkatan sektor jasa seperti penyediaan listrik, air bersih, teknologi komunikasi, dan pendidikan, yang juga membutuhkan infrastruktur fisik, juga harus dilaksanakan. Selain itu, keterbatasan infrastruktur pendukung menjadi tantangan serius bagi UMKM. Infrastruktur yang tidak memadai, seperti akses listrik yang terbatas, kondisi jalan yang buruk, dan minimnya akses internet, menghambat kemampuan UMKM untuk beroperasi dengan efisien dan efektif. Hal ini juga berdampak pada akses UMKM terhadap pasar dan distribusi produk mereka. Keterbatasan infrastruktur logistik di Indonesia, terutama di daerah terpencil, meningkatkan biaya distribusi produk UMKM. Hal ini memengaruhi daya saing mereka di pasar regional (Yolanda, 2024).

3. Strategi Dalam Menghadapi Tantangan Terhadap Pengembangan UMKM

- a. Penciptaan lapangan kerja di sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dapat difasilitasi melalui peningkatan akses kepada pembiayaan. Dengan menyediakan fasilitas pinjaman dan kredit yang lebih mudah diakses untuk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) maka akan lebih mampu melakukan investasi untuk pertumbuhan dan ekspansi, yang pada gilirannya menghasilkan lebih banyak kesempatan kerja. Di samping itu, penerapan program pelatihan dan pendampingan dapat mendukung perkembangan bisnis UMKM dalam meningkatkan operasional produksi yang mereka membawa supaya dapat meningkatkan permintaan tenaga kerja. Dengan mengarahkan

perhatian pada strategi ini negara Indonesia bisa mendorong pertumbuhan serta pengembangan bisnis UMKM agar bisa memberikan kontribusi pada kesejahteraan ekonomi secara menyeluruh. (Azhari et al., 2024)..

- b. Peningkatan program pengembangan keterampilan dan pelatihan untuk wirausahawan UMKM sangat penting. Melalui penyediaan akses terhadap pelatihan dan sumber daya yang relevan, para pelaku UMKM agar memperbaiki kemampuan usaha mereka supaya meningkatkan barang atau jasa yang ditawarkan dan memperluas basis customer mereka karena akan berdampak positif terhadap produksi, daya saing, dan keuntungan usaha UMKM, sehingga dapat memacu perkembangan ekonomi serta membuka lebih banyak peluang kerja bagi masyarakat setempat. Kemudian investasi dapat meningkatkan kemampuan wirausahawan UMKM juga bisa membantu menghubungkan kesenjangan antara pendidikan formal dan praktik bisnis nyata, sehingga di lengkapi dengan pengetahuan serta keterampilan yang diperlukan agar sukses di pasar yang terus berkembang saat ini (Wahyunti, 2020). Maka dari itu mengutamakan program peningkatan keterampilan dan pelatihan pemerintah dapat berperan dengan menciptakan sektor usaha kecil yang lebih inovatif dan berkelanjutan serta memberikan keuntungan bagi para pelaku usaha sekaligus perekonomian secara umum.
- c. Mendorong adopsi teknologi dan inovasi dalam sektor UMKM merupakan langkah penting untuk mendukung pertumbuhan para wirausahawan di sektor ini. Dengan memotivasi pengusaha untuk mengintegrasikan teknologi terbaru dan metode inovatif, mereka dapat meningkatkan efisiensi, produktivitas, serta daya saing mereka di pasar (Nurlia, 2024). Hal ini juga memberikan peluang bagi mereka untuk menjangkau pelanggan baru, memperluas pasar, dan mengembangkan variasi produk. Dengan menerapkan teknologi dan inovasi, pengusaha UMKM dapat menempatkan diri mereka untuk meraih kesuksesan jangka panjang di tengah perubahan dinamika bisnis. Salah satu cara untuk mendukung inovasi dan penggunaan teknologi di sektor UMKM adalah dengan menyediakan pelatihan dan program edukasi yang membantu pengusaha memahami cara menggunakan teknologi baru secara efektif.
- d. Rekomendasi untuk memperbaiki kebijakan yang mendukung UMKM dan penciptaan lapangan kerja meliputi pemberian akses ke sumber daya keuangan dan hibah bagi pelaku usaha UMKM, yang memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan mereka. Ini bisa mencakup penyediaan pinjaman dengan bunga rendah, hibah untuk riset dan pengembangan, serta subsidi untuk penerapan teknologi. Dengan berinvestasi pada kesuksesan bisnis UMKM, pemerintah dapat membantu menciptakan lingkungan bisnis yang lebih stabil dan kompetitif, yang akan membawa manfaat baik bagi pengusaha maupun perekonomian secara keseluruhan (Pardede et al., 2024). Selain itu, menciptakan peluang jaringan dan platform yang menghubungkan bisnis UMKM dengan calon investor dan mitra dapat lebih merangsang pertumbuhan dan inovasi sektor ini. Dengan mengembangkan ekosistem yang mendukung usaha UMKM, pemerintah dapat membuka peluang untuk kesuksesan dan kemakmuran jangka panjang bagi para pelaku ekonomi ini. Dukungan ini juga bisa mencakup akses ke program pelatihan dan sumber daya yang meningkatkan keterampilan dan kapasitas bisnis UMKM. Dengan memberdayakan pelaku usaha untuk mengadopsi teknologi dan praktik bisnis modern, mereka akan lebih efisien, produktif, dan berkelanjutan. Pada akhirnya, perkembangan sektor UMKM akan mendorong pertumbuhan ekonomi,

menciptakan lebih banyak lapangan kerja, dan meningkatkan standar hidup masyarakat secara keseluruhan.

KESIMPULAN

Kebijakan integrasi ekonomi di Indonesia menyebabkan pengaruh signifikan terhadap kemajuan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Kebijakan tersebut menawarkan berbagai peluang, termasuk perluasan akses ke pasar internasional, transfer teknologi dari mitra asing, dan percepatan digitalisasi yang dapat meningkatkan daya saing serta efisiensi operasional UMKM. Berbagai inisiatif seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), digitalisasi melalui Gerakan Bangga Buatan Indonesia (BBI), dan pengembangan infrastruktur fisik serta digital menjadi pendorong utama untuk memperkuat posisi UMKM di pasar global. Namun demikian, penelitian ini juga menggarisbawahi sejumlah tantangan yang dihadapi UMKM. Beberapa di antaranya adalah persaingan dengan produk impor yang memiliki harga dan kualitas lebih kompetitif, keterbatasan modal dan teknologi, minimnya tenaga kerja yang terampil, serta kurangnya infrastruktur yang memadai, terutama di daerah terpencil. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kebijakan integrasi ekonomi membawa manfaat, pelaksanaannya belum sepenuhnya merata dan optimal untuk mendukung seluruh lapisan UMKM.

Untuk mengatasi kendala ini, diperlukan pendekatan yang menyeluruh. Semua pihak, Termasuk di dalamnya pemerintah, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat, karena mereka harus berkolaborasi untuk menciptakan suasana yang mendukung pertumbuhan UMKM. Langkah-langkah strategis seperti peningkatan akses pembiayaan, pelatihan dan pengembangan keterampilan, serta dorongan untuk inovasi dan pemanfaatan teknologi harus terus dilakukan guna memperkuat daya saing UMKM di pasar global. Selain itu, pembangunan infrastruktur fisik dan digital perlu ditingkatkan agar UMKM dapat lebih mudah menjangkau pasar domestik maupun internasional. Secara keseluruhan, kebijakan integrasi ekonomi di Indonesia berpotensi besar untuk meningkatkan kontribusi UMKM terhadap perekonomian nasional. Namun, upaya untuk memperkuat kapasitas UMKM, mengatasi hambatan struktural, dan memaksimalkan dukungan kebijakan masih sangat diperlukan agar UMKM mampu berkembang secara berkelanjutan di tengah persaingan global.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, A., Putra, G. P. E., Pramesti, D. T., & Madiistriyatno, H. (2023). Strategi UMKM Dalam Menghadapi Digitalisasi. *Oikos-Nomos: JURNAL KAJIAN EKONOMI DAN BISNIS*, 16, 33.
- Andarini, S., Ikaningtyas, M., Putri, R. K., Fitria, A. D., & Kartika, R. W. (2023). Strategi Peningkatan Daya Saing UMKM Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN. *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 6(2), 698–707.
<https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i2.3318>
- Asmoro, P. K. (2017). Technology Transfer in Indonesian State Universities: Do Iprs Play a Significant Role? *Indonesia Law Review*, 7(1). <https://doi.org/10.15742/ilrev.v7n1.291>
- Azhari, A., Kamaruddin, K., & Simahatie, M. (2024). Strategi Penciptaan Lapangan Kerja Pada Sektor Umkm Di Indonesia. *Jurnal Ekonomika*, 16(1), 19–25.

<https://doi.org/10.51179/eko.v16i1.2655>

- Cahyadi, I. (2015). Tantangan Internasionalisasi Ukm Di Indonesia Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean. *Kajian*, 20(02), 129–143. <https://pure.ltu.se/>
- Fardani, A., Fajri, F. N., Muhsoni, R., & Hidayat, F. R. (2024). *The Impact of UMKM Growth and Road Infrastructure on Economic Growing Impact in the Village of Korang Mukti*. 01(01), 24–36.
- Firdaus, M. I., Marseto, & Sishadiyati. (2021). analisis DAMPAK INTEGRASI EKONOMI TERHADAP FOREIGN DIRECT INVESTMENT DI ASEAN. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 2(3), 494. <http://jiss.publikasiindonesia.id/>
- Fuat, M. A., & Salomo, R. V. (2023). Implementasi Kebijakan Peraturan Pemerintah 7 Tahun 2021 yang Berkaitan dengan Pemberdayaan UMKM dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Kementerian Koperasi dan UMKM. *Briliant: Jurnal Riset Dan Konseptual*, 8(2), 281. <https://doi.org/10.28926/briliant.v8i2.1283>
- Hapsari, Y. A., Apriyanti, P., Hermiyanto, A., & Rozi, F. (2024). *Analisa Peran UMKM Terhadap Perkembangan Ekonomi di Indonesia*. 4.
- Hasran, Rasya Athalla Aaron, R. F. F. (2024). *Dampak Kebijakan Perdagangan Terhadap Daya Saing UMKM di Indonesia: Kasus Pembatasan Impor Melalui E-Commerce*. 24, 1–14.
- Hermana, A. A., Fajrin, H. M., Reva, Y. N., & Zein, M. (2025). *Dampak MEA (Masyarakat Ekonomi Asean) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia di Era Globalisasi*. 4.
- Jasin, M. (2017). Meningkatkan Daya Saing Pelaku Usaha Indonesia Menghadapi ASEAN Economic Community (AEC) 2015. *Jurnal Ekonomi*, 19(No 19), 5.
- Mokalu, O. Y., Montolalu, J., & Keles, D. (2018). Pemanfaatan Fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) Terhadap Peningkatan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) (Studi Kasus Bank Mandiri Kantor Kas Manado Paal Dua). *Jurnal Administrasi Bisnis*, 6(1), 46–49.
- Naibaho, A. P., Puspita, R., & Eliza, S. (2023). Tantangan dan Implikasi Integrasi Ekonomi Regional terhadap Pembangunan Ekonomi Kawasan ASEAN. *Jurnal Ilmiah Multi Disiplin Indonesia*, 2(9), 2001–1285.
- Nurlia, H. R. (2024). Strategi pemasaran produk umkm di era digital. *Jurnal Ilmiah Kajian Multidisipliner*, 8(5), 640–647.
- Pardede, S. J., Rizqiah, K., & Suwito. (2024). Strategi Pemberdayaan UMKM Untuk Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Guna Kemandirian Ekonomi Bangsa Indonesia. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 11(2), 1526–1538.
- Putra Sitorus, A. (2018). Politik Hukum Perlindungan Usaha Mikro Kecil Menengah (Ukm) Dalam Masyarakat Ekonomi Asean. *Doktrina: Journal of Law*, 1(2), 125.

- <https://doi.org/10.31289/doktrina.v1i2.1920>
- Rijali, A. (2019). Analisis Data Kualitatif. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 17(33), 81.
<https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>
- Setiawan, R. I. (2015). Persepsi Tenaga Kerja Lokal Pada Invasi Tenaga Kerja Asing Di Indonesia: Tantangan Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (Mea) Tahun 2015. *Jurnal Kompilasi Ilmu Ekonomi (KOMPILEK)*, 7(2), 202–218.
<http://journal.stieken.ac.id/index.php/kompilek/article/view/192>
- Suhairi, S., Safitri, D., Fauzan, M., & Helma Musyafa, M. (2024). Etika Dan Tanggung Jawab Sosial Dalam Pemasaran Global: Membangun Reputasi Yang Berkelanjutan. *Jurnal Minfo Polgan*, 12(2), 2660–2664. <https://doi.org/10.33395/jmp.v12i2.13338>
- Wahyunti, S. (2020). PERAN STRATEGIS UMKM DALAM MENOPANG PEREKONOMIAN INDONESIA DI TENGAH PANDEMI COVID 19. *J-ESA (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 03, 208–302.
- Winarno, B. (2014). Globalisasi dan Rezim Demokrasi Poliarki: Kebijakan Inetegrasi Ekonomi Indonesia. *Jurnal Hubungan Internasional*, 3(1), 1–12.
<https://doi.org/10.18196/hi.2014.0041.1-12>
- Yasmanlizar. (2024). Analisis Dampak Kebijakan Ekonomi Terhadap Pertumbuhan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkm) di Era Digital. *Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam (SEBI)*, 6(2), 73–85.
- Yolanda, C. (2024). Peran Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Dalam Pengembangan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 2(3), 170–186.
<https://doi.org/10.36490/jmdb.v2i3.1147>